

## **BAB.1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Organisasi Ekonomi Pedesaan memainkan peran penting dalam memperkuat ekonomi pedesaan, namun masih sering menjadi titik lemah. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk memajukan organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa dan mengembangkan jaringan ekonomi guna meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, dan telah terbukti memberikan keuntungan serta menambah pendapatan desa di beberapa wilayah. BUMDes adalah institusi ekonomi di tingkat desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (Muhammad, 2021) Berdirinya BUMDes dilandasi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa” (Alfurkaniati, 2017)

Aspek utama dari sebuah BUMDes adalah manajemen laporan keuangan. Dengan mengelola laporan keuangan dengan benar, BUMDes dapat mengevaluasi kinerjanya dan membuat keputusan yang tepat. Oleh karena itu, semua jenis bisnis, termasuk BUMDes, diharuskan untuk menyusun laporan keuangan (Kapantow, 2023). Namun dalam kenyataannya, masih banyak BUMDes yang melakukan pencatatan keuangan secara kurang memadai sehingga pada tanggal 24 Oktober 2016, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang dimaksudkan untuk memberikan informasi keuangan dan membantu UMKM maupun BUMDes sebagai acuan dalam menjalankan usaha.

Dalam menyusun laporan keuangan, BUMDes harus memperhatikan standar akuntansi keuangan yang berlaku agar laporan tersebut mudah dipahami. Sebagian besar kegiatan BUMDes mirip dengan kegiatan UMKM pada umumnya, sehingga penyusunan laporan keuangan harus mengikuti pedoman umum. Dalam hal ini, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2018, harus digunakan. SAK EMKM diterbitkan untuk diterapkan pada entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Secara umum, UMKM adalah entitas tanpa akuntabilitas publik karena biasanya tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (SAK EMKM I. A., 2016)

Berdasarkan data dari Kementerian Desa PDTT (Masterplandes, 2023), hanya ada 12.945 BUMDes yang telah memiliki status badan hukum. Sementara itu, sekitar 35.000 BUMDes masih dalam proses pendaftaran. Oleh karena itu, masih ada sekitar 42 persen desa yang belum memiliki BUMDes. Perkembangan BUMDes di Indonesia di dorong oleh banyaknya masyarakatnya sendiri, terutama di provinsi Jawa Timur sedikit BUMDes yang berstatus maju. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil E. Dardak, menyatakan bahwa dari 6.100 badan usaha milik desa (BUMDes) di Jawa Timur, hanya 537 atau 12 persen yang berstatus maju.

Tidak bisa dipungkiri, pengembangan BUMDes masih menghadapi banyak tantangan. Akibatnya, beberapa BUMDes yang telah didirikan mengalami mati suri. Penelitian yang dilakukan oleh (Istihara Amin Hijji, 2018) di BUMDes Rempak Lanjing, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, menemukan beberapa hambatan, antara lain:

1. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam pengelola penyusunan keuangan yang masih rendah,
2. komunikasi yang tidak efektif dan arus informasi yang terbatas di kalangan elit desa,
3. perbedaan pemahaman mengenai aturan terkait BUMDes,
4. rendahnya partisipasi dan dukungan masyarakat

Menurut (Rizki Fatah Maulana, 2023) Laporan keuangan merupakan suatu proses dalam proses akuntansi yang mempunyai peranan penting bagi pengukuran dan penilaian kinerja sebuah instansi ataupun usaha. Usaha di Indonesia, khususnya perusahaan yang besar diharuskan membuat laporan keuangan setiap periodenya. Laporan keuangan tersebut sangat sangat berguna untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Laporan keuangan juga berperan sebagai ukuran bagi pemilik untuk mengestimasi keuntungan yang diperoleh, menilai tambahan modal yang tercapai, dan memahami keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap keputusan pemilik dalam mengembangkan bisnisnya akan bergantung pada kondisi keuangan yang tercatat secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan laba belaka. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan memberikan manfaat yang besar dan menjadi kebutuhan esensial bagi manajemen perusahaan dalam merumuskan keputusan terkait penyelesaian masalah perusahaan. Dari laporan keuangan, perusahaan dapat memperoleh informasi tentang kinerja tenaga kerja, arus kas, dan data lain yang relevan. Akuntansi memiliki standar tersendiri dalam penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi tersebut meliputi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Standar ini membantu akuntan dalam membuat laporan keuangan. Standar akuntansi ini ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan diatur berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. Dengan luas 3.115 km<sup>2</sup>, Situbondo merupakan wilayah salah satu kabupaten di provinsi Jawa Timur, kabupaten Situbondo memiliki sumber daya alam yang potensial, bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, pariwisata maupun UMKM.

Potensi tersebut menjadi peluang munculnya BUMDes hampir di seluruh desa di Kabupaten Situbondo. dilansir pada (BUMDesa Situbondo, 2022) berdasarkan data BUMDes tahun 2022 jumlah BUMDes yang ada mencapai 101 BUMDes dari 132 desa di Kabupaten Situbondo. Sebanyak 6 BUMDes sedang dalam proses pendaftaran badan hukum, sementara 26 BUMDes lainnya sedang dalam proses verifikasi dokumen. Secara keseluruhan, ada 70 BUMDes yang sedang menuju status badan hukum, yang merupakan 69 persen dari total 101 BUMDes yang ada di Kabupaten Situbondo.

Salah satunya BUMDes yang berdiri di Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo yakni BUMDes Banyu Mandiri. BUMDes yang masih berstatus aktif dan berbadan hukum di bentuk oleh 7 desa di Kecamatan banyuglugur, BUMDes telah berdiri sejak lama pada Tahun 2012. BUMDes Banyu Mandiri menjalankan usaha unit simpan pinjam yang di modalkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah serta di kelola oleh Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) dalam menjalankan BUMDes di Kecamatan Banyuglugur, dalam pelaksanaannya, pengurus BUMDes sering kali melakukan pencatatan keuangan pemasukan dan pengeluaran kas dan menjadikannya transaksi namun tidak ada penjurnalan, kendala laporan keuangan BUMDes Banyu Mandiri sempat di pertanyakan oleh pihak yang berkepentingan namun, Banyu Mandiri juga tidak mengetahui apakah laporan keuangan yang meraka susun sudah sesuai dengan standar yang berlaku atau tidak. Hal ini terjadi di karenakan kurangnya pemahaman terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar tertentu.

Pengelolaan catatan keuangan dapat memakan waktu dan tenaga jika dilakukan secara manual dan memerlukan dokumentasi yang cermat. Selain itu, risiko kesalahan pencatatan keuangan sangat tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan SAK EMKM untuk mempermudah pengelolaan pencatatan keuangan secara profesional, transparan dan bertanggung jawab. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat terlaksana dengan baik jika dalam penyusunan laporan keuangan berlandaskan dengan Standar Akuntansi Keuangan, sehingga dari semua pihak dengan pedoman standar keuangan yaitu SAK EMKM yang sesuai standar dan sesuai diharapkan dapat mencegah terjadinya kesalahan dana yang diterima oleh BUMDes yang dapat merugikan desa dalam keadaan demikian, serta mencegah dana BUMDes disalah gunakan untuk memberikan manfaat bagi desa itu sendiri.

Sehingga penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperbaiki laporan keuangan BUMDes Bersama Banyu Mandiri sesuai SAK EMKM. Maka penelitian ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ REKONTRUKSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI SAK EMKM PADA BUMDES BERSAMA BANYU MANDIRI KABUPATEN SITUBONDO ”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana cara merekonstruksi laporan keuangan BUMDes Banyu Mandiri di Kabupaten Situbondo sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah ( SAK EMKM )

### 1.3. Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi laporan keuangan BUMDes Banyu Mandiri dengan menerapkan SAK EMKM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa pencatatan dan penyusunan laporan keuangan BUMDes Banyu Mandiri sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku

### 1.4. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat dalam penelitian di tinjau dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, antara lain :

#### 1. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana pembelajaran bagi peneliti untuk terjun langsung ke lapangan dan mengetahui perbedaan antara teori dan keadaan nyata di lapangan serta untuk meningkatkan kemampuan di bidang penelitian ilmiah dalam mengungkap permasalahan tertentu dan mencoba memecahkan permasalahan tersebut.

##### b. Bagi Perguruan Tinggi

Dapat dijadikan referensi bahan perkuliahan dan penelitian lebih lanjut terkait SAK EMKM

##### c. Bagi BUMDes Bersama Banyu Mandiri

Sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi para pengurus BUMDes dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar yang telah ditetapkan, serta untuk memahami pentingnya akuntansi sesuai standar pada unit usaha yang akan dikembangkan.

#### 2. Manfaat Teoritis

Dapat menerapkan ilmu dan pengetahuan akuntansi dalam penerapan siklus akuntansi sesuai SAK EMKM pada BUMDes Bersama Banyu Mandiri